

LAMPIRAN XL  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

---

RENCANA KERJA KECAMATAN TAMBAKBOYO  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) dan Rencana Startegis (Renstra) Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dengan pagu pendanaannya. Dalam penyusunan Renja Kecamatan Tambakboyo Tahun 2021 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunannya adalah Renstra Kecamatan Tambakboyo Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021. Program dan kegiatan yang dijabarkan dalam matrik meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Renja perangkat daerah disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan tahapan dan

tata cara penyusunannya secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja Perangkat Daerah disusun oleh kepala perangkat daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Renstra perangkat daerah yang telah ditetapkan yang akan bermuara dalam mendukung pencapaian misi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renja, penyusunan Rancangan Renja, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan Penetapan Renja. Mekanisme dan waktu penyusunan renja bersinergi dengan penyusunan RKPD, karena pada dasarnya RKPD merupakan rangkuman dari renja-renja Perangkat Daerah yang dikolaborasi menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun harus mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Selanjutnya renja Perangkat Daerah akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja OPD Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- 3) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- 4) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- 5) Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- 6) Perumusan tujuan dan sasaran;
- 7) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- 8) Perumusan kegiatan prioritas;
- 9) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- 10) Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- 11) Pembahasan forum OPD; dan
- 12) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

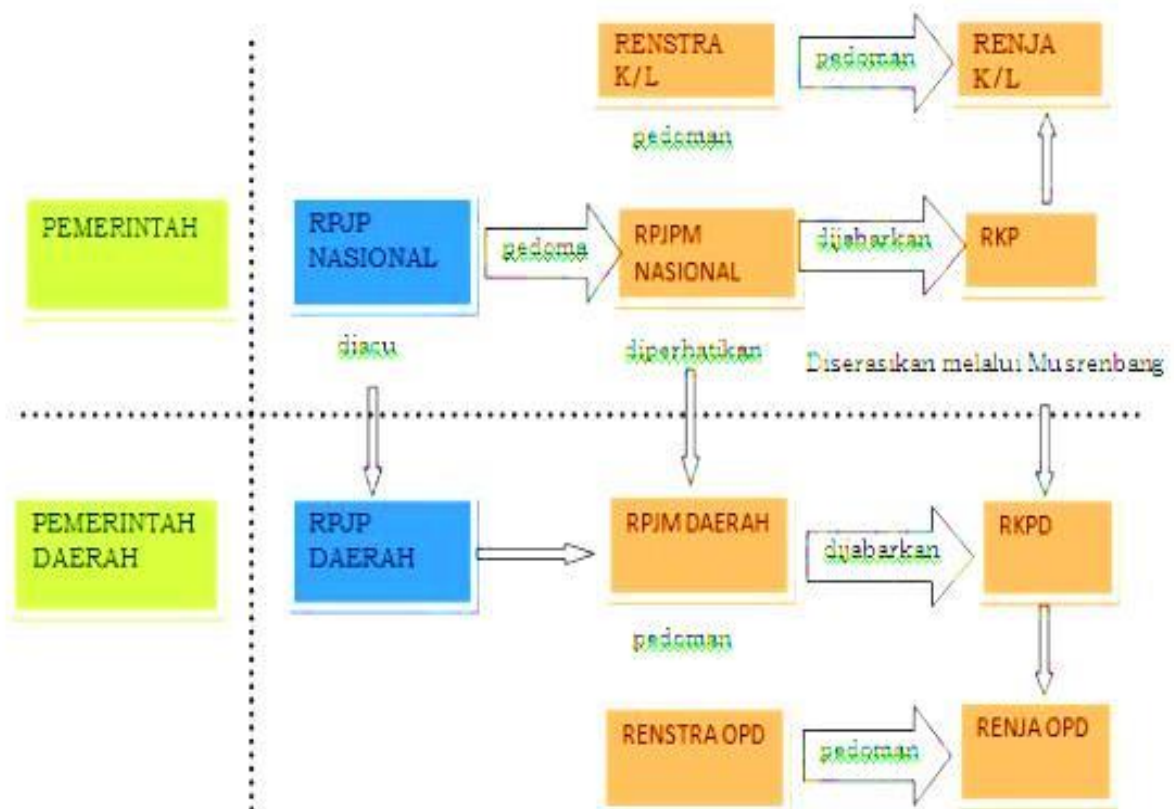
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Tahap Penyajian rancangan Renja OPD merupakan sistematis penyajian Rancangan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses penyusunan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

- 1) OPD menyusun Renja-OPD.
- 2) Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Rancangan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Rancangan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Keterkaitan antar dokumen-dokumen perencanaan:

Gambar 1.1. Skema Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah



penyusunan RPJP Nasional dan dengan mempedomani RPJP Nasional kemudian disusun RPJM Nasional dan selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan dalam bentuk RKP yang mana Rancangan RKP diserasikan melalui MUSRENBANG. Dari hasil MUSRENBANG maka Menteri menyusun Rancangan Akhir RKP dan atas dasar RKP tersebut menjadi pedoman penyusunan RAPBN. Pada tingkat Kementerian/Lembaga penyusunan RENSTRA K/L mempedomani RPJM Nasional yang selanjutnya dijabarkan kedalam RENJA K/L dan penyusunan RENJA K/L diturunkan dari RKP yang merupakan penjabaran dari RPJM Nasional.

Keterkaitan penyusunan rencana pembangunan daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pemerintah pusat dan K/L sangat erat kaitannya yaitu penyusunan RPJP Daerah harus mengacu kepada RPJP Nasional dan dari RPJP Daerah kemudian diturunkan kedalam RPJM Daerah dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional dan selanjutnya RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD dan seperti halnya RKP maka RKPD juga harus melalui proses MUSRENBANGDA. RPJMD dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan seterusnya diturunkan ke RENJA OPD.

Dengan telah tersusunnya RPJMD, maka seluruh OPD harus menyusun RENSTRA OPD dengan berpedoman pada RPJMD tersebut dan selanjutnya disusun RENJA OPD yang merupakan pelaksanaan dari RENSTRA OPD untuk diteruskan dalam rangkaian proses seterusnya sampai dengan penyusunan RKA untuk ditetapkan menjadi DPA-OPD. Dalam proses yang sama Pemerintah Daerah menyusun RKPD Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui proses pembahasan di internal OPD maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kabupaten

Tuban dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang kemudian ditindaklanjuti dan dituangkan dalam proses penyusunan APBD Tahun 2021.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tuban;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2021.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 66 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 tahun 2017 tentang Renstra Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 telah menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2020 telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021;

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

#### 1.3.1 MAKSUD

1. Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

#### 1.3.2. TUJUAN

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;
2. Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021;
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan



kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Tambakboyo Tahun 2021 sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

#### BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

## BAB. II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kantor Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban tahun lalu sampai tahun berjalan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini. Turunan Renja OPD Tahun 2020 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

##### 1. Belanja Tidak Langsung

	Anggara	Anggaran	%
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.378.000,00	1.378.000,00	100,00
1. Pendapatan Retribusi Daerah	378.000,00	378.000,00	100,00
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
II. BELANJA	2.380.941.183,00	2.101.001.124,00	88,24
1. Belanja Tidak Langsung	1.432.909.188,00	2.101.001.124,00	88,03
1.1. Gaji dan Tunjangan PNS	1.419.093.786,00	1.273.611.093,00	89,75
1.2. Tambahan Penghasilan PNS	1.057.904.146,00	962.138.064,00	90,95
2. Belanja Langsung	513.817.604,00	457.353.183,00	89,01

##### 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2019 terdiri atas Program dan kegiatan dengan realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020  
 Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09	URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
4.09.16.50	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	80	100	80	100	125	80	280	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.09.16.50.01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	7	7	7	7	100	7	21	300
4.09.16.50.02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah Peralatan Perkantoran	5	5	5	5	100	5	15	300
4.09.16.50.03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	5	5	5	5	100	5	15	300
4.09.16.50.04	Pengadaan sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Diadakan	12	12	6	6	100	12	30	250
4.09.16.50.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	10	7	6	5	85	10	22	220
4.09.16.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Prosentase Aparatur OPD Mematuhi Peraturan Kedinasan (%)	80	100	100	100	100	80	280	350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Daya Aparatur</i>									
4.09.16.10.05.16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang Disediakan	27	27	25	25	100	27	79	292
4.09.16.10.05.17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Kompentensi	27	27	25	25	100	27	79	292
4.09.16.11	<i>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Nilai AKIP OPD</i>	B	B	B	B (68,33)	100	B	B	300
4.09.16.11.06	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi,	Jumlah Dokumen	6	6	6	6	100	6	18	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah									
4.09.16.11.02	Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang Disediakan	9	9	9	9	100	9	27	300
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM									
1.05.4.09.16.43	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	80	100	100	100	300	300
1.05.4.09.16.43.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	48	48	48	48	100	48	144	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.4.0 9.16 43.02	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana	12	12	12	12	100	12	36	300
1.05.4.0 9.16 43	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID 19	Jumlah desa potensi persebaran Covid-19,yang dikoordinasikan, Jumlah koordinasi, Jumlah dokumen pelaporan	-	-	-	-	-	18 desa/ 60 kali 1 laporan	18 desa/ 60 kali 1 laporan	-
2.07.4.0 9.16.36	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDes	100	100	80	80	100	80	260	260



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.4.0 9.16.36. 10	Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	18	18	18	18	100	18	54	300
2.07.4.0 9.16.40.	<i>Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa</i>	<i>Prosentase desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai ketentuan(%)</i>	100	100	75	100	133	100	280	280
2.07.4.0 9.16.40. 01	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah asistensi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa	100	100	100	100	100	100	300	300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.4.0 9.16.36.	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa mendapat Asistensi pengelolaan keuangan desa	18	18	18	18	100	18	54	300
2.07.4.0 9.16.36. 04	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa mendapat Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	18	18	18	18	100	18	300	300
5 . 2 . 33	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilsa IKM	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik (88,55)	200	Baik	400	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemda/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 . 2 . 33 . 09	Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah jenis rekomendasi perijin yang diterbitkan dalam satu tahun reklame, IMB, SITU, Ijin Keramaian	5	5	3	3	100	3	11	220

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan administrasi perkantoran sangat baik. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 88,68%, Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa sebesar 81,63 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa sebesar 81,74, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan sebesar 77,77%, dan Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran yaitu sebesar 84,66%. Sedangkan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Kecamatan realisasi atau serapan anggaran mencapai 92,19%. Sedang untuk capaian kinerja /output yang dihasilkan dari masing-masing program bisa dilihat ditabel atas.

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan pada Kantor Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Review Renstra 2016-2021, sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2. :

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

No	Indicator	SPM / Standart nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	-	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	
2.	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, pembangunan, Perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan sosial	-	-	65	70	90	100	70	100	90	100	
3.	Peningkatan jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	-	-		18	18	18		16	16	18	
4.	Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo	-	-	B	B	BB	BB	B	BB	BB	BB	

Pada pencapaian 4 indikator Kecamatan Tambakboyo, pada tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik dokumen jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan pada tahun 2013. Untuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Untuk menentukan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021. Adapun hasil pencapaian tahun 2019 dan perkiraan pencapaian tahun 2021 akan diurutkan sesuai program.

### 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambakboyo , menghadapi beberapa isu penting diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparatur di Desa;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun;
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

#### 2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya disiplin aparatur pemerintah Desa dalam pemungutan PBB;

- b. Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah;
  - c. Kesadaran masyarakat dalam penanganan bencana masih rendah;
  - d. Fasilitasi program dan kegiatan Desa (ADD, DD);
  - e. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- a. Kesadaran dalam pemeliharaan hasil pembangunan masih rendah;
  - b. Minimnya dukungan anggaran pemberdayaan masyarakat;
  - c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
  - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, Desa;
  - e. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
4. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah;
  - b. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
  - c. Data intervensi kemiskinan belum terpadu;
  - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (Raskin, RTLH, BLT, dll);
  - g. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - h. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.
5. Seksi Pelayanan Umum
- a. Kurangnya sarana dan prasarana PATEN;
  - b. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Desa dalam pelayanan kepada masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap Corona Virus Disease 2019
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentati peraturan dan perundang-undangan

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan Aparatur pemerintah kecamatan, dan desa dengan mengirim diklat/bimtek
2. Meningkatkan ketersediaan Dokumen-dokumen Perencanaan, LkjIP, Laporan Keuangan.
3. Meningkatkan pembinaan dan pemantauan aparatur desa dalam pemungutan PBB.
4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan.
5. Menyusun dokumen perencanaan yang lebih baik.
6. Mengajukan promosi jabatan untuk pegawai yang berkompetensi.
7. Merangkul masyarakat untuk turut serta dalam rencana pembangunan lewat kegiatan musrenbangdes maupun musrenbangcam.
8. Konsisten terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
9. Memperkuat koordinasi antar OPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
10. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah desa dan instansi-instansi terkait untuk monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
11. Memaksimalkan kemampuan sumber daya perencanaan dengan diikutkan diklat-diklat perencanaan pembangunan.
12. Melakukan kegiatan pembinaan mitigasi bencana alam kepada masyarakat.

#### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2021 dirumuskan dari hasil



musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tuban Tahun 2021 yang memuat usulan program dan kegiatan tahun 2021 yang terdiri dari 10 program dan 23 kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten untuk disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2020.

Adapun table review terhadap rancangan RKPD Kecamatan Tambakboyo tahun 2021 dapat dilihat pada *TABEL 2.4*

TABEL 2.4  
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2021  
KECAMATAN TAMBakBOYO KABUPATEN TUBAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	154,837	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	154,837	-
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jasa administrasi perkantoran,	7	95,737	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jasa administrasi perkantoran	7	95,737	-
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran	5	20,000	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran,	5	20,000	-
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	6	34,000	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	6	34,000	-
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			-
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Tambakboyo	Jumlah SPPD Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6	5,100	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Tambakboyo	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	6	5,100	-
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kec. Tambakboyo	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi	80	37,162	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kec. Tambakboyo	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi	80	37,162	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Daya Aparatur		peraturan kedinasan (%)			Daya Aparatur		peraturan kedinasan (%)			
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tambakboyo	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25	8.750	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tambakboyo	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	25		-
7	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Tambakboyo	Jumlah sumber daya aparatur 22 PNS dan 3 Non PNS	25	28.412	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Tambakboyo	Jumlah sumber daya aparatur	150	28,412	-
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambakboyo	Nilai AKIP SKPD	BB		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambakboyo	Nilai AKIP SKPD	BB		-
8	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Tambakboyo	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	32,200	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Tambakboyo	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	32,200	-
9	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Tambakboyo	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	58,800	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Tambakboyo	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	58,800	-
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Tambakboyo	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	18,000	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Tambakboyo	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	18,000	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
10	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	18	18,000	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	18	18,000	-
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Tambakboyo	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	80	36,000	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Tambakboyo	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80	36,000	-
11	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan	18	18.000	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	18	18.000	-
12	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah fasilitasi bantuan keuangan desa yang dilaksanakan	18	18.000	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	18	18.000	-
VI	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Tambakboyo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	Baik	12,900	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Kec. Tambakboyo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Baik	12,900	-
13	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	2	12,000	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Tambakboyo	Jumlah ijin yang diterbitkan	2	12,000	-

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp. 000)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Tambakboyo	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	55.000	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Tambakboyo	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	55.000	-
14	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Tambakboyo	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	55,000	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Tambakboyo	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	55.000	-
15	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Tambakboyo	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	48	18,000	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Tambakboyo	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	48	18,000	-
16	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID-19	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa/kelurahan potensi persebaran Covid-19,yang dikoordinasikan, Jumlah koordinasi, Jumlah dokumen pelaporan	1	100.000	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID-19	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa/kelurahan potensi persebaran Covid-19,yang dikoordinasikan, Jumlah koordinasi, Jumlah dokumen pelaporan	1	100.000	-

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tambakboyo akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja(Renja) Kecamatan Tambakboyo Tahun 2021 untuk dimusyawarahkan dalam Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan ( *stake holders* ) dapat dilihat pada: *TABEL 2.5*

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021  
Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jasa administrasi perkantoran	7	
2	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran,	5	
3	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah jenis sarana prasarana perkantoran	6	
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Kec. Tambakboyo	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran		
5	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Tambakboyo	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	6	
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Tambakboyo	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedisiplinan (%)	80	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tambakboyo	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		
2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kec. Tambakboyo	Jumlah sumber daya aparatur	25	
III	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Kec. Tambakboyo	Nilai AKIP SKPD	BB	
1	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Kec. Tambakboyo	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	6	
2	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Kec. Tambakboyo	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah	9	
IV	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Kec. Tambakboyo	Prosentase desa memiliki BUMDES	80	
1	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	18	
V	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Kec. Tambakboyo	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	80	
1	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan	Kec.	Jumlah desa yang	18	

	Keuangan Desa	Tambakboyo	mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		
2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi bantuan keuangan desa	18	
VI	Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Kec. Tambakboyo	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Baik	
1	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Kec. Tambakboyo	Jumlah ijin yang diterbitkan	3	
VII	Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kec. Tambakboyo	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	
1	Kegiatan Koordinasi penyenggaraan Kemasyarakatan	Kec. Tambakboyo	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan	48	
2	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Kec. Tambakboyo	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	48	
3	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID-19	Kec. Tambakboyo	Jumlah desa potensi persebaran Covid-19,yang dikoordinasikan, Jumlah koordinasi, Jumlah dokumen pelaporan	1	



### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Tambakboyo telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambakboyo Tahun 2021. Rencana Kerja Kecamatan Tambakboyo merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah

mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja OPD.

Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2019, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tuban dapat menyentuh sasaran yang tepat.

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategis goal*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Tuban adalah :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa.

### 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan).

#### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tambakboyo dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran.
  - 1) Penyediaan Jasa Perkantoran
  - 2) Penyediaan Peralatan Perkantoran
  - 3) Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - 5) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - 2) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
3. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
  - 1) Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja
  - 2) Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah
4. Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa;

- 1) Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa
5. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa;
- 1) Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa
  - 2) Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan;
- 1) Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya untuk mencapai target-target sasaran yang telah ditetapkan maka berikut ini disampaikan Program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai target-target sasaran tersebut yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai berikut :

TABEL 4.1  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022  
KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
4	09			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum								
03	01	50		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (rentan angka 0-100)	Kec. Tambakboyo	80	154,837	APBD		80	154,837
03	01	50	01	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah jasa perkantoran yang tersedia	Kec. Tambakboyo	7	57,600	APBD	Tiap bulan	7	57,600
03	01	50	02	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Jumlah jenis Peralatan Perkantoran yang tersedia	Kec. Tambakboyo	5	71,737	APBD	Tiap bulan	5	71,737
03	01	50	03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang terpelihara	Kec. Tambakboyo	6	25,500	APBD	Tiap bulan	6	25,500
03	01	50	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran yang diadakan	Kec. Tambakboyo			APBD			
03	01	50	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kec. Tambakboyo	6	5,100	APBD	Tiap bulan	6	5,100
03	01	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan	Kec.	80	216,221	APBD		80	216,221

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
					kedinasan	Tambakboyo						
03	01	5	16	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kec. Tambakboyo			APBD			
03	01	5	17	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapatkan kompetensi	Kec. Tambakboyo	25	28.412	APBD	Tiap bulan	25 28.412	
03	01	11		Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP SKPD	Kec. Tambakboyo	BB	32,200	APBD		BB 32.200	
03	01	11	2	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi, pelaporan dan publikasi kinerja yang tersusun	Kec. Tambakboyo	6	32,200	APBD	Tribulan I Tribulan IV	6 32,200	
03	01	11	6	Fasilitasi kinerja pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kec. Tambakboyo	9	2.268,101	APBD	Tiap bulan	9 2.268,101	
03	01	27		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES	Kec. Tambakboyo	80	17,990	APBD		80 17,990	
03	01	27	08	Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Kec. Tambakboyo	18	17,990	APBD	Tiap bulan	18 17,990	
03	01	36		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan	Kec. Tambakboyo	80	36,000	APBD	Tiap bulan	80 36.000	
03	01	36	1	Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Asistensi	Kec.	18	18.000	APBD	Tiap bulan	18 18.000	

Kode				Urusan/Bidanga Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana tahun 2022	
						Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikator (Rp. 000)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	
					Pengelolaan Keuangan Desa	Tambakboyo						
03	01	36	4	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kec. Tambakboyo	18	18.000	APBD	Tiap bulan	18	18.000
4	08			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pelayanan Perijinan					APBD			
03	01	33		Program Peningkatan Kualaitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan	Kec. Tambakboyo	Baik	12,900	APBD		Baik	12,900
03	01	33	9	Kegiatan Operasional pelaksanaan perijinan di tingkat kecamatan	Jumlah jenis ijin yang diterbitkan	Kec. Tambakboyo	3	12,900	APBD		3	12,900
03	01	43		Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kec. Tambakboyo	100		APBD		100	
03	01	43	1	Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan yang dilaksanakan	Kec. Tambakboyo	48	54,960	APBD	Tiap bulan	48	54,960
03	01	43	2	Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah yang dilaksanakan	Kec. Tambakboyo	48	17.987	APBD	Tiap bulan	48	17.987
05	2	01	02	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Persebaran COVID-19	Jumlah desa potensi persebaran Covid-19,yang dikoordinasikan, Jumlah koordinasi, Jumlah dokumen pelaporan	Kec. Tambakboyo	18 desa 60 kali 1 laporan	99.963	APBD	Tiap bulan	18 desa 60 kali 1 laporan	99.963



BAB V  
P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun P-RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2021 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2020 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
4. Renja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2021;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

